

**EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID 19 DI
DESA SERMONG KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH :

ANWAR IBRAHIM

NIM 217130092

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID 19 DI
DESA SERMONG KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020



Disusun dan diajukan Oleh :


ANWAR IBRAHIM
NIM:217130092

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi Mataram, 5 Agustus
2021

Pembimbing

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN.0806066801

Pembimbing II


Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., M.M
NIDN.0806039101

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan




Aratulloh Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID 19 DI
DESA SERMONG KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020

Disusun dan diajukan Oleh :

ANWAR IBRAHIM
NIM: 217130092

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 5 Agustus 2021 Dinyatakan
telah memenuhi persyaratan
Menyetujui

Tim Penguji

1. Dr. H. Muhammad Ali, M. Si (PU) 
NIDN.0806066801
2. Nurul Hidayati Indra Ningsih, S. E. M.M (PP) 
NIDN.0806039101
3. Drs. Amil, M. M (PN) 
NIDN. 0831126204

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplak, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 30 Agustus 2021

Mahasiswa,



Anwar Ibrahim

217130092



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Ibrahim
NIM : 217130092
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang 19 April 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 082 339 251 057 / anwar.ibrabim63193@gmail.com

Judul Penelitian :-

Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Serucong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

Penulis


Anwar Ibrahim
NIM. 217130092

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos. M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Ibrahim
NIM : 217130092
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang, 15 April 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOI
No. Hp/Email : 082 339 251 057
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Sernong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

Penulis


Anwar Ibrahim

NIM. 217130092

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S. AL- Baqarah ayat 216)

Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia memanfaatkanmu.

(HR. Muslim)



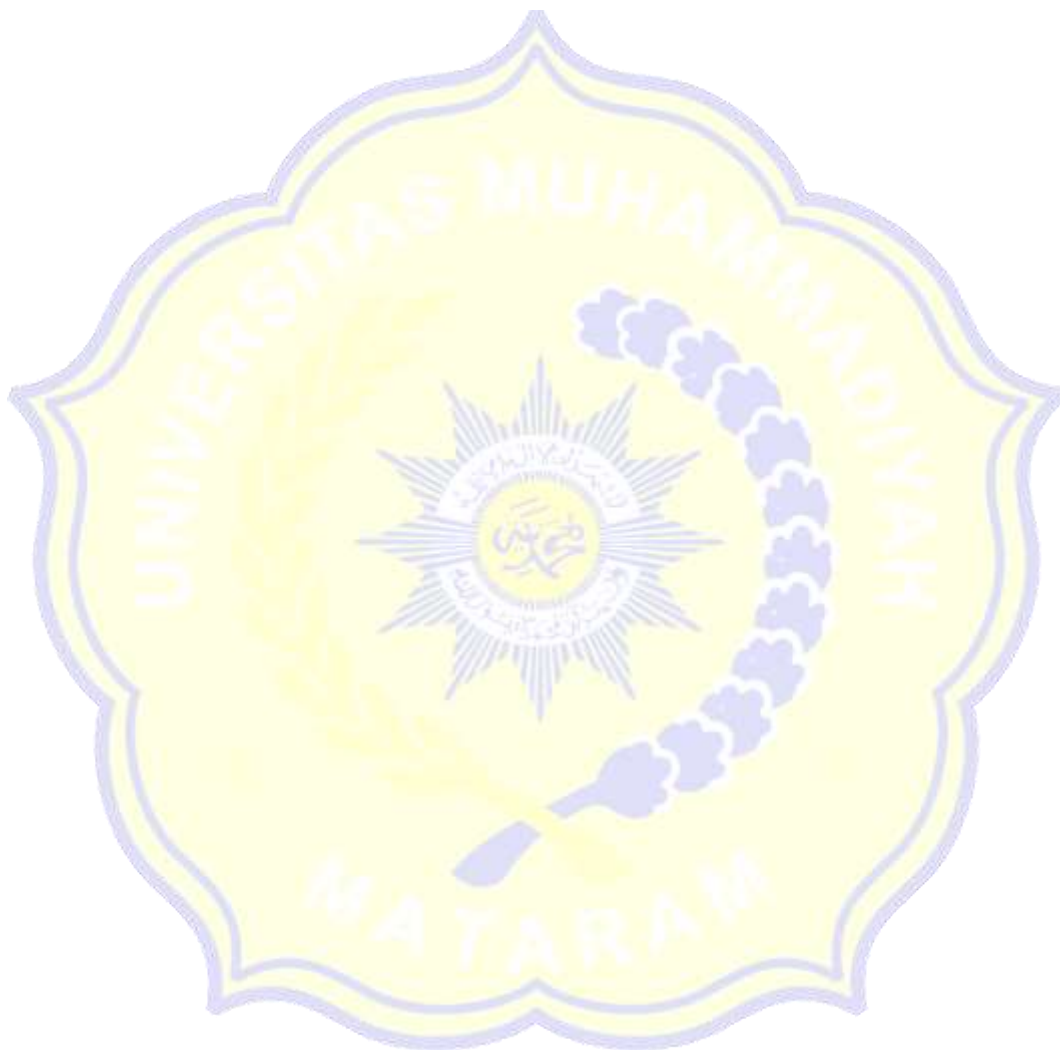
PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang diberikan oleh Allah SWT, serta dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Andik dan Nurhidayah, terimakasih telah merawat, membesarkan, dan mendidik serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia, berkat do'a dan suport yang tiada henti untuk anakmu inisehingga bisa menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Kakakku Eva Apriani dan Evi Apriani yang selalu memberikan semangat dan do'a tiada hentinya kepada adikmu ini sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
3. Terimakasih kepada seluruh Keluarga besarku Kakak, Abang, Paman , dan Bibi yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu terimakasih do'a dan suportnya serta semangat yang kalian berikan untuk membantu keberhasilan studiku dan penyusunan skripsi.
4. Semua Teman-teman Angkatan 2017 dan rekan seperjuangan khususnya kelas C Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tiada henti memberi dukungan dan semangat.
5. Kepada teman-temanku selama di rantauan Ayatullah al-fitrah, Andre Asta Saputra, Yan Surya Qinandra, Jihad Antaralam, Angga, Fery, Sani, Arfy, Agus, Amrun Maharani, Erick Saputra, Panji. terimakasih sudah menjadi rumah kedua tempat ku berbagi cerita suka maupun

duka dan terimakasih juga atas tongkrongan yang selalu punya kenangan tersendiri di setiap momen-momennya.

6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020)”**.Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT
2. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

5. Untuk seluruh kepala staf KTU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Nurul Hidayati Indra Ningsih S. E, M.M selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing serta mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepadapenulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Kepala Desa Sermong Bapak Rosidi Sos dan Sekretaris Desa Sermong Bapak Aan Subandi, serta seluruh staf pemerintah Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang senantiasa membantu penulis dalam melaksanakan penelitian serta masyarakat yang telah memberikan informasi dan kerjasamanya dalam terlaksananya penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi

amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah S.W.T. Aamiin Ya Rabbal`alamin.

Mataram, 24 Juni 2021
Penulis,

Anwar Ibrahim
NIM.217130092



**EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID 19 DI
DESA SERMONG KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020**

Anwar Ibrahim, Muhammad Ali, Nurul Hidayati Indra Ningsih
Mahasiswa, Pembimbing, Pembimbing Utama
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Awal tahun 2020, pandemi Covid 19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah faktor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan fokus anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan fokus adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

Kata Kunci: Efektifitas; BLT; Dana Desa

THE EFFECTIVENESS OF THE VILLAGE FUND DIRECT ASSISTANCE PROGRAM FOR THE POOR COMMUNITIES AFFECTED BY COVID 19 IN SERMONG VILLAGE, TALIWANG, WEST SUMBAWA IN 2020

Anwar Ibrahim, Muhammad Aji, Nurul Hidayati Indra Ningsih
Student, Advisor, Companion Advisor
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic became a global issue in the early of 2020. Even governments around the world are overburdened, yet they continue to strive to restrict the virus's spread and mitigate its different impacts. The economic impact of the Covid-19 epidemic is one of the consequences. Indonesia is no exception; the community's economy has suffered as a result of the outbreak. And one of the initiatives taken by the Indonesian government to overcome this is to concentrate the budget on various current budget posts. The Village Fund is another financial item that is being discussed. Village monies, which were designed for village development and development, were moved to Village Fund Direct Support cash assistance funds (BLT Dana Desa). There are still numerous issues about the effectiveness of this program's execution. As a result, this study was carried out to see how effective the Village Fund Direct Cash Assistance program is. Sermong Village, Taliwang, West Sumbawa, was the site of this study. The findings of the research reveal that the effectiveness of this program, particularly for the poor, is extremely useful to them, and that the majority of the community supports the central government's initiative.

Keywords: *Effectiveness, BLT, Village Fund*

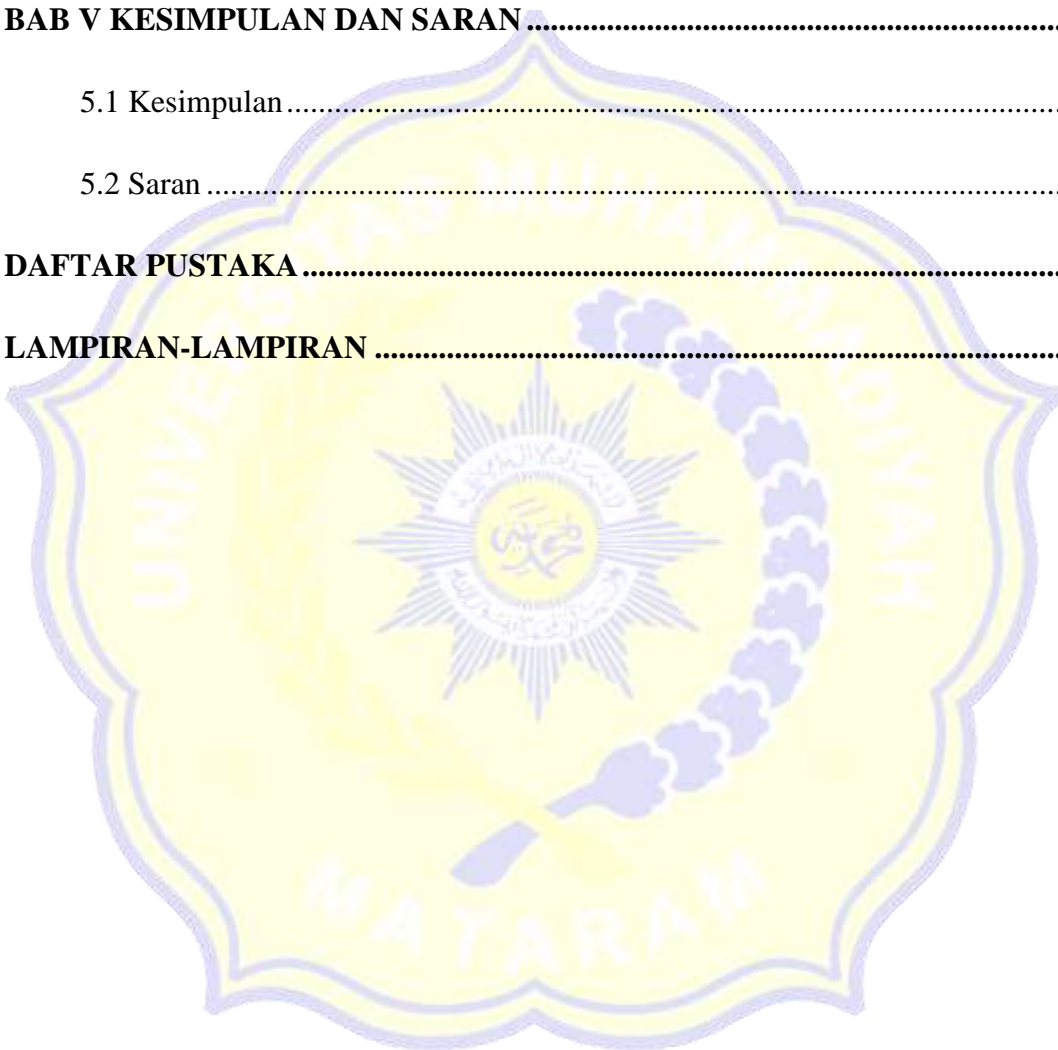


DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik	14
2.2.2 Proses Kebijakan Publik	16
2.2.3 Konsep Efektifitas.....	19

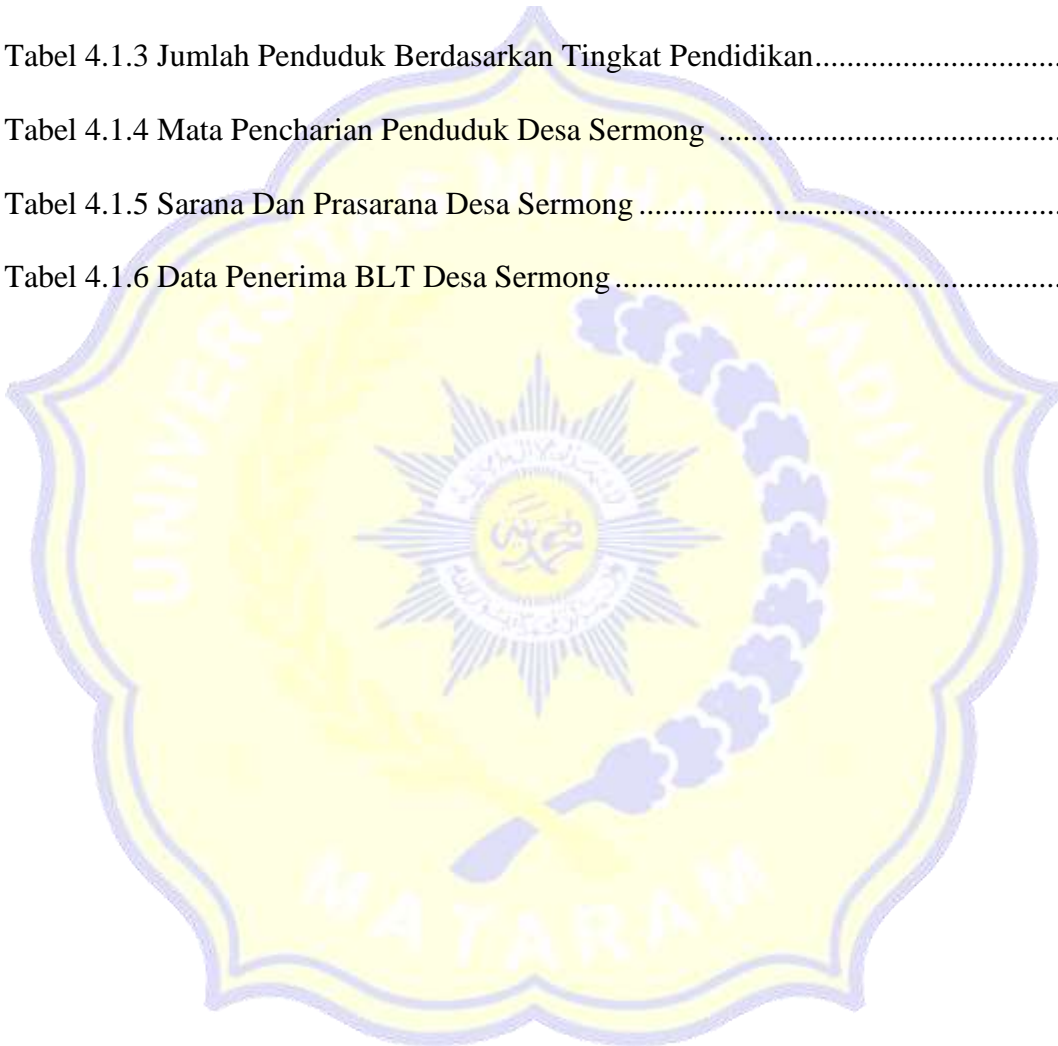
2.2.4 Konsep Bantuan Langsung Tunai	21
2.2.5 Oragnisasi Pelaksanaan Penyaluran Dana BLT	24
2.2.6 Konsep Kemiskinan	28
2.3 Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Penentuan Informan Atau Narasumber	37
3.4 Metode Pengumpulan data	37
3.4.1 Metode Observasi	38
3.4.2 Metode Wawancara	38
3.4.3 Metode Dokumentasi	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5.1 Jenis Data	39
3.5.2 Sumber Data	40
3.5 Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Deskripsi Data	42
4.1.1 Profil Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.2 Jumlah Penduduk Desa Sermong.....	43
4.1.3 Tingkat Pendidikan Desa Sermong	44
4.1.4 Mata Pencharian Penduduk Desa Sermong.....	44

4.1.5 Sarana Dan Prasarana Desa Sermong	45
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Faktor Penghambat Dan Pendukung BLT	46
4.2.2 Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67



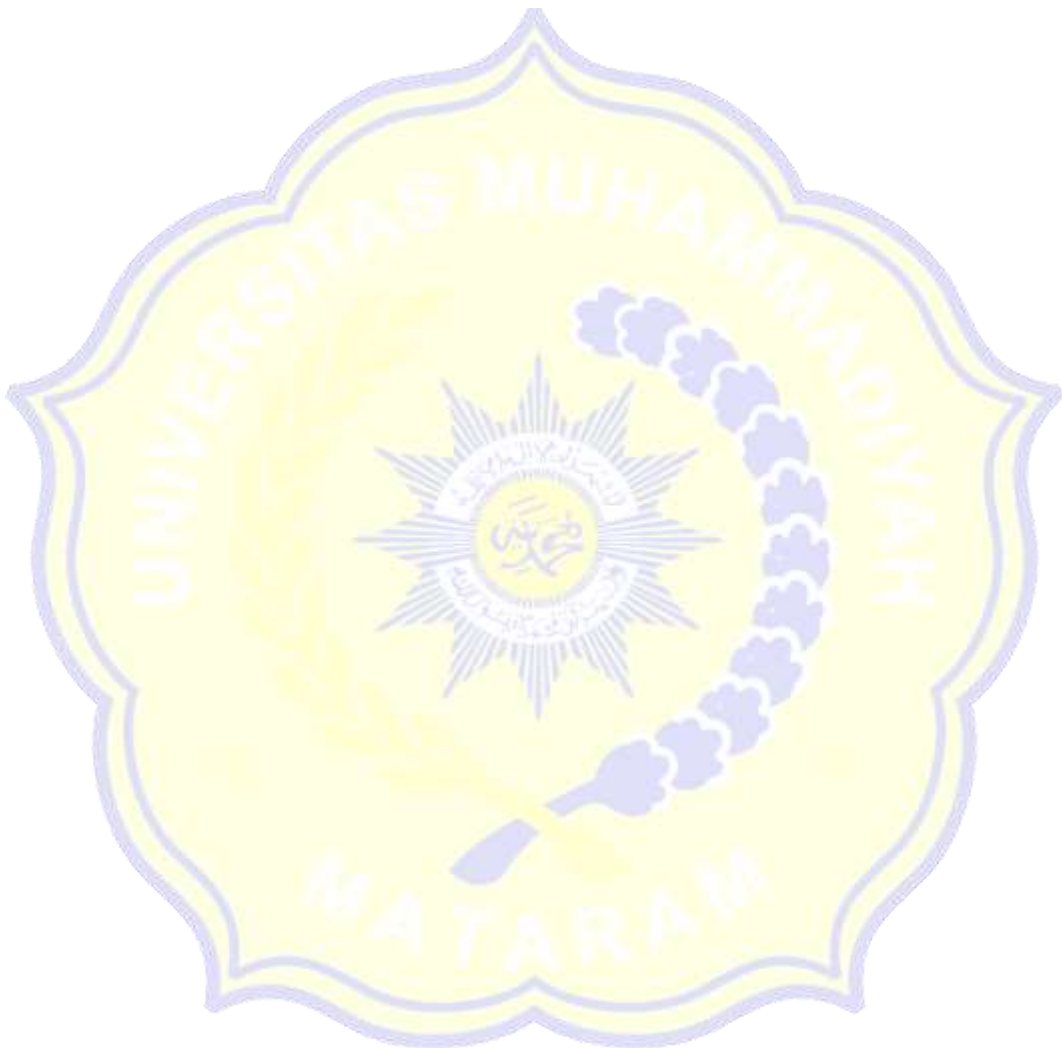
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019	2
Tabel 1.2 Data Penerima BLT di NTB	5
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1.2 Jumlah penduduk Desa Sermong Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 4.1.4 Mata Pencharian Penduduk Desa Sermong	44
Tabel 4.1.5 Sarana Dan Prasarana Desa Sermong	45
Tabel 4.1.6 Data Penerima BLT Desa Sermong.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pembagian BLT kepada Masyarakat.....	65
Gambar 2 : Pembagian BLT tahap VII.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, hal ini disebabkan karena kondisi Indonesia yang masih memiliki beberapa aspek yang masih berstatus berkembang, salah satunya masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri juga masih memiliki banyak masalah sosial dalam upaya untuk berkembang, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan salah satu hal yang sudah lama terjadi di Indonesia terutama tahun 2014-2015, kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, hingga politik yang belum stabil. Menurut data kemiskinan pada tahun 2019, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2019 yang mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 530 ribu jiwa dibandingkan posisi September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan posisi Maret tahun lalu (BPS, 2019).

Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara

dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan (Suharto, 2008: 23). Selain itu, tujuan negara juga diungkapkan oleh Wicaksono (2006: 18), yaitu menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tertuang amanat konstitusi, seperti perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Badjuri dan Teguh, 2002: 54).

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019

No	Data Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1.	Provinsi NTB	4.773.795	735,96
2.	Kabupaten Sumbawa Barat	148.606	20.450
3.	Kecamatan Taliwang	51.203	2.974
4.	Desa Sermong	1.147	280

Sumber : (BPS, Kabupaten Sumbawa Barat 2019)

Menurut data kemiskinan propinsi NTB pada tahun 2019, menunjukkan jumlah penduduk yaitu 4.773.795 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk miskin yaitu 735,96 ribu (14,63%). Data jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat 148.606 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 20.450 jiwa (13,85%). Sedangkan data jumlah penduduk Kecamatan Taliwang yaitu 51.203 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 2.974

jiwa. Khusus nya di Desa Sermong jumlah penduduk miskin mencapai 280 jiwa, dari jumlah penduduk yaitu 1.147 jiwa.

Pada awal tahun 2020, virus corona menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan virus ini sebagai *Public Health Emergency of International Concern*. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Covid 19. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi tentang wabah ini. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan virus ini sebagai pandemi.

Pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak, karena jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif

yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak Corona virus, pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah ini.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus(Musdesus).

Tabel 1.2 Data Penerima BLT di NTB

No.	Data Penerima BLT di NTB	Jumlah RTS Penerima BLT	Jumlah RTS Sangat Miskin	Jumlah RTS Miskin	Jumlah RTS Hampir Miskin
1.	NTB	1.171.201	348.893	1.644.513	1.277.795
2.	Kabupaten Sumbawa Barat	1.512	1.386	4.345	3.615
3.	Kecamatan Taliwang	5.335	1.290	3.278	4.880

Sumber: (BPS, Kabupaten Sumbawa Barat 2019)

Di NTB, penerima BLT sebanyak 1.171.201 RTS, yang terdiri dari 348.893 rumah tangga sangat Miskin, 1.644.513 rumah tangga miskin, dan 1.277.795 rumah tangga hampir

miskin. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 1.512 RTS, yang terdiri dari 1.386 rumah tangga sangat miskin, 4.345 rumah tangga miskin, dan 3.615 rumah tangga hampir miskin. Kecamatan Taliwang terdapat 5.335 RTS, sedangkan khususnya di desa Sermong terdapat 188 KK penerima BLT.

Peneliti melakukan observasi di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan hasil observasi awal, bahwa program BLT di Desa Sermong Kecamatan Taliwang dinilai tidak tepat di tengah pandemi covid 19, dengan berbagai pandangan seperti penerpan BLT tidak efektif dan hanya mendorong pola hidup masyarakat konsumtif barang, BLT akan menyebabkan mental pengemis karena pemerintah hanya membagi-bagikan uang sehingga masyarakat menjadi malas, pemerintah tidak menggunakan pendataan masyarakat yang akurat dalam merealisasikan program BLT itu karena masih menggunakan data tahun 2017, dimana waktu itu belum melibatkan unsur pemerintahan dan pengurus setempat yang lebih tau kondisi daerah masing-masing. BLT secara terus menerus bisa menimbulkan potensi terjadinya konflik di masyarakat, angka kemiskinan, kriminalitas, bunuh diri di tengah masyarakat juga akan meningkat.

Selain itu, efektivitas program BLT di Desa Sermong Kecamatan Taliwang tidak optimal, karena data yang dipakai

tidak dilakukan revisi atau diverifikasi terlebih dahulu. Penyampaian BLT membutuhkan data tentang siapa dan dimana RTS yang layak menerima BLT tersebut bertempat tinggal. Data tersebut merupakan data kemiskinan mikro yang memuat informasi tentang nama dan alamat serta karakteristik kemiskinan lainnya. Penerima BLT tahun 2020 diterapkan berdasarkan hasil pendataan tahun 2017, pemakaian data tahun 2017 untuk pembagian kali ini tentu sangat kurang tepat, yang kemungkinan data tersebut sudah tidak *up to date*, dan terjadi banyak perubahan, karena sudah hampir 4 tahun. Ada yang tadinya miskin, kemudian sudah terangkat derajatnya, tetapi ada pula yang tadinya pas-pasan kemudian sekarang menjadi miskin.

Selain itu, alasannya banyak kepala rumah tangga yang bersebelahan dengan kondisi yang hampir sama, yang satu dapat BLT dan yang satu lagi tidak. Dari segi penyaluran, masyarakat dihimbau agar tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana dalam pembagian BLT ini dilakukan dalam beberapa *sift* diantaranya pada waktu pagi sekitaran jam 08:30 masyarakat diharapkan sudah berada di kantor desa, dan *sift* siang sekitaran jam 15:00. Hal ini dilakukan sesuai arahan pemerintah agar tetap menjaga jarak serta memperhatikan protokol kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang?
2. Bagaimanakah Efektivitas program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang.
2. Untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik dari segi teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang efektivitas program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan terutama mengenai efektivitas program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19.
2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal tentang efektivitas program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Iqbal (2013) dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Hasil pengamatan di lapangan adalah (1) Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun hanya sedikit yang menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan, (2) Verifikasi data nominasi RTS tidak berjalan dengan semestinya, hanya 52 desa yang melaksanakan prosedur tersebut. Kendala yang terjadi adalah kartu BLT sudah diterima kepala desa sebelum verifikasi data, adanya arahan dari kantor pos untuk tidak melaksanakan prosedur verifikasi, dapat mengalihkan kartu BLT kepada orang lain dengan membawa surat keterangan dari desa, dan menimbulkan konflik di masyarakat, karena adanya pencoretan nama RTS yang dianggap tidak miskin lagi.
2. Salam (2012), berjudul Fenomena Kemiskinan (Studi Kritis Atas Falsafah Hidup Orang Jawa). Dalam penelitian skripsinya ini Nur Salam mengangkat pertanyaan tentang bagaimana fenomena kemiskinan terutama keterkaitannya dengan falsafah hidup orang

Jawa. Dan hasil dari penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa pandangan hidup orang Jawa merupakan pandangan yang didasari pada mitos dan cerita-cerita mistik yang mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keharmonisan. Pandangan tersebut secara historis diciptakan oleh penguasa (raja) yang mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan (dewa) sehingga memonopoli tanah dan menjadikan petani (wong cilik) sebagai obyek pengambilan upeti (pajak). Akibatnya wong cilik tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan termiskinkan. Kemiskinan yang dialami oleh petani (wong cilik) terjadi karena akibat kurangnya atau minimnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik.

3. Marini (2012), berjudul Dampak Penyaluran Bantuan Lansung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya 75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak pantas untuk mendapatkan BLT. Ini semua disebabkan karena 45 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden. Manfaat BLT bagi masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa di hargai oleh pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya pemerintah peduli kepada mereka. Dan mudarnya BLT ini terhadap masyarakat

miskin adalah membuat masyarakat miskin menjadi malas, dapat menyebabkan pertikaian yang terjadi terhadap sesama masyarakat, dan masyarakat merasa ketidakpuasan terhadap proses BLT, lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itulah penyebab BLT haruslah dihapuskan dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik dan lebih mementingkan masyarakat miskin bukan hanya untuk menjaga image pemerintah saja. Untuk lebih jelasnya dapat di paparkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Jenis Penelitian	Teknik Pengumpulan dan analisa Data	Hasil penelitian
1.	Iqbal, 2013	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus	Penelitian Kualitatif	Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan analisa dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, yang didalam nya berisi tentang rangkuman catatan-	Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Hasil pengamatan di lapangan adalah (1) Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun hanya sedikit yang menindaklanjuti dengan

				<p>catatan lapangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.</p>	<p>mengadakan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan , (2) Verifikasi data nominasi RTS tidak berjalan dengan semestinya, hanya 52 desa yang melaksanakan prosedur tersebut. Kendala yang terjadi adalah kartu BLT sudah diterima kepala desa sebelum verifikasi data, adanya arahan dari kantor pos untuk tidak melaksanakan prosedur verifikasi, dapat mengalihkan kartu BLT kepada orang lain dengan membawa surat keterangan dari desa, dan menimbulkan konflik di masyarakat,</p>
--	--	--	--	--	---

					karena adanya pencoretan nama RTS yang dianggap tidak miskin lagi.
2.	Salam, 2012	Fenomena Kemiskinan (Studi Kritis Atas Falsafah Hidup Orang Jawa	Penelitian Kualitatif	Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan triangulasi, dengan cara menanyakan hal yang sama mealalui sumber yang berbeda yakni dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, yang didalam nya berisi tentang rangkuman catatan-catatan lapangan yang berhubungan dengan permasalahan	hasil dari penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa pandangan hidup orang Jawa merupakan pandangan yang didasari pada mitos dan cerita-cerita mistik yang mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keharmonisan.

				penelitian.	
3.	Marini, 2012	Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.	Penelitian Kuantitatif	Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah dengan kuesioner dan pengambilan sampel menggunakan teknik <i>random sampling</i> . Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah korelasi <i>intraclass</i> dan variabel control.	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya 75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah reponden yang tidak pantas untuk mendapatkan BLT. Ini semua di sebabkan karena 45 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden. Manfaat BLT bagi masyarakat miskin yaitu masyarakat

					<p>miskin merasa di hargai oleh pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya pemerintah peduli kepada mereka.</p>
--	--	--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisianannya akan menghadapi banyak kendala atau

dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson (2014: 11) juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Fredrich Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan.

sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn (2014:16) sebagai berikut.

a. Isi kebijakan (*policy content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak

melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

c. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan dalam Ayuningtyas (2014: 30).

a. Pembuatan Agenda

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

b. Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapantahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan, penilaian pilihan, perputaran untuk penelaahan sejawat dan

revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

c. Pengadopsian Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

d. Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn (2003) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan: mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka definisi konseptual dari kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijaksanaan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijaksanaan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

2.2.3 Konsep Efektivitas

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam

hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas dalam Sugiyono (2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif. (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan

demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Makmurdalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting

untuk mencapai suatu keefektifitasan.

5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

2.2.4 Konsep Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai adalah program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mempunyai tujuan yang utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang tergolong miskin, (Wibawa, 2009: 76). Bantuan Langsung Tunai adalah program kompensasi jangka pendek dengan maksud, agar konsumsi rumah tangga sasaran, yaitu rumah tangga sasaran yang tergolong sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*). Dengan demikian walaupun program program BLT bukan satu-satunya

program yang berkenaan dengan pemecahan masalah sosial di tengah covid 19, khususnya saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menuju keseimbangan yang baru (Tangkilisan, 2010 : 65)

Bantuan Langsung Tunai adalah sejumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga yang termasuk dalam dalam kategori miskin, BLT dibagikan kepada rumah tangga sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp.600.000. Adapun tujuan dari Bantuan Langsung Tunai ini adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi di tengah pandemi covid 19 dan juga meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Harapan pemerintah pada masyarakat penerima BLT adalah dapat mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat efektifitas juga sangat berperan dalam konsep bantuan lansung tunai seperti yang di jelaskan Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *Official Goal*.

2.2.5 Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Dana BLT

Pelaksanaan program Bantuan Lansung Tunai adalah Departemen Sosial selaku kuasa penggunaan anggaran dibantu oleh pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Lansung Tunai untuk rumah tangga sasaran. Penyaluran bantuan lansung tunai kepada rumah tangga sasaran merupakan suatu bentuk kerja sama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, sehingga lembaga bertanggung jawab terhadap kelancaran bidang tugas masing-masing. Bentuk kerja sama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT kepada rumah tangga sasaran atau kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi optimal.

Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang maksimal, maka masing-masing lembaga saling berkoordinasi dan dalam program BLT difasilitasi penyediaan unit pelaksanaan program BLT tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing instansi dapat dilihat dari Instruksi

Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang pelaksanaan program BLT untuk rumah tangga sasaran yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Departemen Sosial

Departemen sosial memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana berdasarkan daftar nominatif dan menyampaikan surat perintah kepada Pos Indonesia untuk membayar dana BLT untuk rumah tangga sasaran. Setelah itu kerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) untuk menyalurkan dana tersebut sesuai dengan daftar nominatif penerima BLT yang disampaikan oleh Pusat Biro Statistik (BPS). Untuk kejelasan bagaimana proses penyalurannya, Departemen Sosial berkewajiban untuk membuat dan menyusun petunjuk teknis penyaluran BLT bersama dengan 40 Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT Pos Indonesia (persero). Sebagai Penanggungjawab kepada pemerintah, Departemen sosial berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI tentang Pelaksanaan Penyaluran dana BLT kepada Presiden RI.

b. Kewajiban PT Pos Indonesia (persero)

Adapun kewajiban dari PT Pos Indonesia untuk program BLT dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak di tengah pandemi virus corona adalah penyimpanan rekening giro utama di Bank Cabang Indonesia Veteran. Berdasarkan anggaran dari Departemen Sosial yang akan disalurkan

kepada rekening Giro. Kantor Pos mencetak dan menyalurkan Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke KRPK (Kantor Pos Pemerintah) seluruh Indonesia berdasarkan daftar normatif, selanjutnya KPRK menyalurkan KKB kepada rumah tangga sasaran bekerja sama dengan aparat desa setempat, TKSM (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat) dan aparat keamanan bila diperlukan dalam hal ini PT Pos Indonesia juga harus melaporkan realisasi penyaluran KKB kepada Departemen Sosial dan selanjutnya menyampaikan rencana penyaluran dana BLT.

c. Kewajiban Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran untuk menyiapkan dana BLT PT Pos Indonesia dan BRI juga membebaskan dana administrasi pembukaan rekening dan membedakan atas kewajiban setoran pertama dalam pembukuan giro di Kantor Cabang BRI Jakarta Veteran dan Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia. Demi kelancaran dalam proses penyaluran dan segala administrasi BLT, BRI memberikan kemudahan kepada PT Pos Indonesia untuk memindahbukukan dana dari rekening Giro Kantor Pos Seluruh Indonesia. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab, BRI juga menyampaikan laporan keuangan mutasi rekening Giro utama dari Giro Kantor Pos melalui layanan tunai manajemen BRI.

d. Kewajiban Badan Pusat Statistik

Lembaga ini memiliki peranan dan kewajiban untuk menyediakan data rumah tangga sasaran penerima BLT yang di kategorikan rumah tangga sangat miskin, dan rumah tangga miskin. Untuk menyediakan data tersebut dilakukan data terakhir (*updating*) di lapangan, verifikasi dan evaluasi rumah tangga sasaran oleh petugas BPS juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

e. Kewajiban Dinas Sosial/Instansi Pemerintah Provinsi

Pada tataran dinas/Instansi sosial Provinsi untuk proses program BLT tersebut, berkewajiban mengelola unit pelaksanaan BLT pada tingkat Provinsi dan struktur pelaksanaannya, ketua pengelola Unit Pelaksana Program (UUP) BLT adalah kepala dinas sosial, yang bertugas secara intensif selama pelaksanaan program BLT. Melakukan pembinaan, supervisor dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT termasuk unit pelaksanaan program BLT di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Juga mengkoordinasikan dinas/instansi sosial kabupaten/kotadalam pelaksanaan pendampingan terhadap kantor pos pada saat pembagian BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

f. Kewajiban Dinas/Instansi Kabupaten Kota

Pada tingkat jajaran dinas atau instansi sosial Kabupaten/Kota, pada proses penyaluran BLT memiliki peran dan kewajiban untuk mengelola unit pelaksana program BLT dan sebagai jabatanyang menduduki struktur organisasi pengelola penyaluran BLT, sebagai ketua pengelola UUP BLT adalah kepala dinas atau instansi sosial, sekretaris dan anggota ditetapkan pejabat di lingkungan dinas sosial yang bertugas secara instensif selama proses pelaksanaan proram bantuan langsung tunai.

g. Kewajiban Kecamatan (Camat)

Mengelola UUP BLT pada tingkat kecamatan. Memantau mitra kerja pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan yang akan terlibat secara efektif dalam pendistribusian kartu BLT dan penyaluran dana BLT secara pengendalian dan pengamanan di lapangan. Menyelenggarakan pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan. Menginformasikan program BLT kepada RTS dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum. Memantau petugas pos pada saat distribusi kartu BLT untuk sampai pada sasaran yaitu RTS. Melakukan pendampingan dan membantu petugas pos pada saat pembagian kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Memantau penyelesaian masalah oleh desa/kelurahan sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangan melalui instansi terkait, termasuk kepada dinas pada tingkat kecamatan.

Membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara berjenjang kepada pihak terkait, termasuk kepada dinas sosial kabupaten/kota.

h. Kewajiban Desa/Kelurahan

Memantau petugas pos pada pencairan atau penerimaan BLT dan pendistribusian kartu kepada rumah tangga sasaran. Bersamaan dengan petugas pos menentukan pengganti RTS yang pindah/meninggal (tanpa ahli waris) atau tidak berhak, melalui rembug desa/kelurahan yang dihadiri kepala desa/kelurahan, RT/RW tempat tinggal RTS yang diganti, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Melakukan pendampingan pada petugas pos pada saat pembagian kartu BLT dan penyebaran BLT dengan melibatkan tenaga kerja kesejahteraan sosial masyarakat. Mengupayakan penyelesaian yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi dan penyaluran BLT) sesuai dengan jenis dan tingkat kewenangan (Widiyanto, 2008: 78).

2.2.6 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena bermatra multidimensional. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan berdasarkan segi ekonomi, khususnya pendapatan, berupa uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima seseorang. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada

dibawah nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan maupun non makan, yang disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty Treshold*) (Suharto, 2008: 21).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai, seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, air minum, dan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak ada akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan dan kehormatan yang layak sebagai warga negara, sekaligus juga memutus akses terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan hidup, perlindungan atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Selain itu pemenuhan hak dasar penduduk dimaksud juga erat kaitannya dengan pengembangan wilayah, yaitu untuk percepatan pembangunan perdesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir serta percepatan pembangunan daerah tertinggal (Parsons, 2005: 76).

Ada tiga tipe orang miskin berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam setiap tahun, yaitu:

1. Miskin, orang miskin yang berpenghasilan jika diwujudkan dalam bentuk beras adalah 320 kg/orang/tahun.

2. Sangat miskin, orang yang dikatakan sangat miskin adalah orang yang berpenghasilan jika di wujudkan dalam bentuk beras adalah 240 kg/orang/tahun.
3. Termiskin, orang miskin yang berpenghasilan jika diwujudkan dalam bentuk beras adalah 180 kg/orang/tahun.

Kemiskinan memiliki beberapa cirri, yaitu sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentangan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
7. Ketiadaan terhadap akses lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpendil) (Suharto, 2008: 14)

Menurut David (2010: 14), kemiskinan dapat dibagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi, globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang adalah negara yang maju, dan negara yang sedang berkembang jadi terpinggirkan oleh persaingan pasar bebas yang merupakan pasar globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan substansi (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan perdesaan (kemiskinan akibat peminggiran perdesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan akibat hakekat dan percepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial, kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial, kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal.

Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu sebagai berikut :

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan umumnya rendah.
4. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas.

5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.
6. Makan sehari sekali tetapi jarang makan telur atau makan daging (makanan bergizi).
7. Tidak bisa berobat karena sakit.
8. Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau pimpinan kepala keluarga perempuan (Wibawa, 2009: 25)

Adapun yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan karena kolonialisme, kemiskinan ini terjadi karena penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa lain, sehingga bahasa yang dijajah menjadi tertindas, baik dibidang ekonomi, politik dan sebagainya.
2. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural, hal ini berkaitan dengan suku bangsa tertentu yang kental kebudayaannya, seperti suku kubu di Sumatera, suku dayak di pedalaman Kalimantan.
3. Miskin karena terisolir, seorang menjadi miskin karena tempat tinggalnya jauh dari keramaian sehingga sulit berkembang.
4. Miskin struktural, adalah kemiskinan yang ditegarai karena kondisi struktural atau tatanan kehidupan yang menguntungkan. Kemiskinan ini juga disebabkan oleh persaingan yang tidak seimbang antar negara atau daerah yang mempunyai keunggulan komparatif (Wibawa, 2009: 29).

Menurut David (2010: 18), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Sikap dan pola pikir yang rendah dan malas untuk bekerja.
2. Kurang keterampilan.
3. Adanya diskriminasi antara orang kaya dengan orang miskin.
4. Pendidikan yang rendah.
5. Faktor alam/lahan yang sempit.
6. Tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.
7. Populasi penduduk yang tinggi.
8. Belenggu adat dan Kebiasaan.

2.3 Kerangka Berfikir

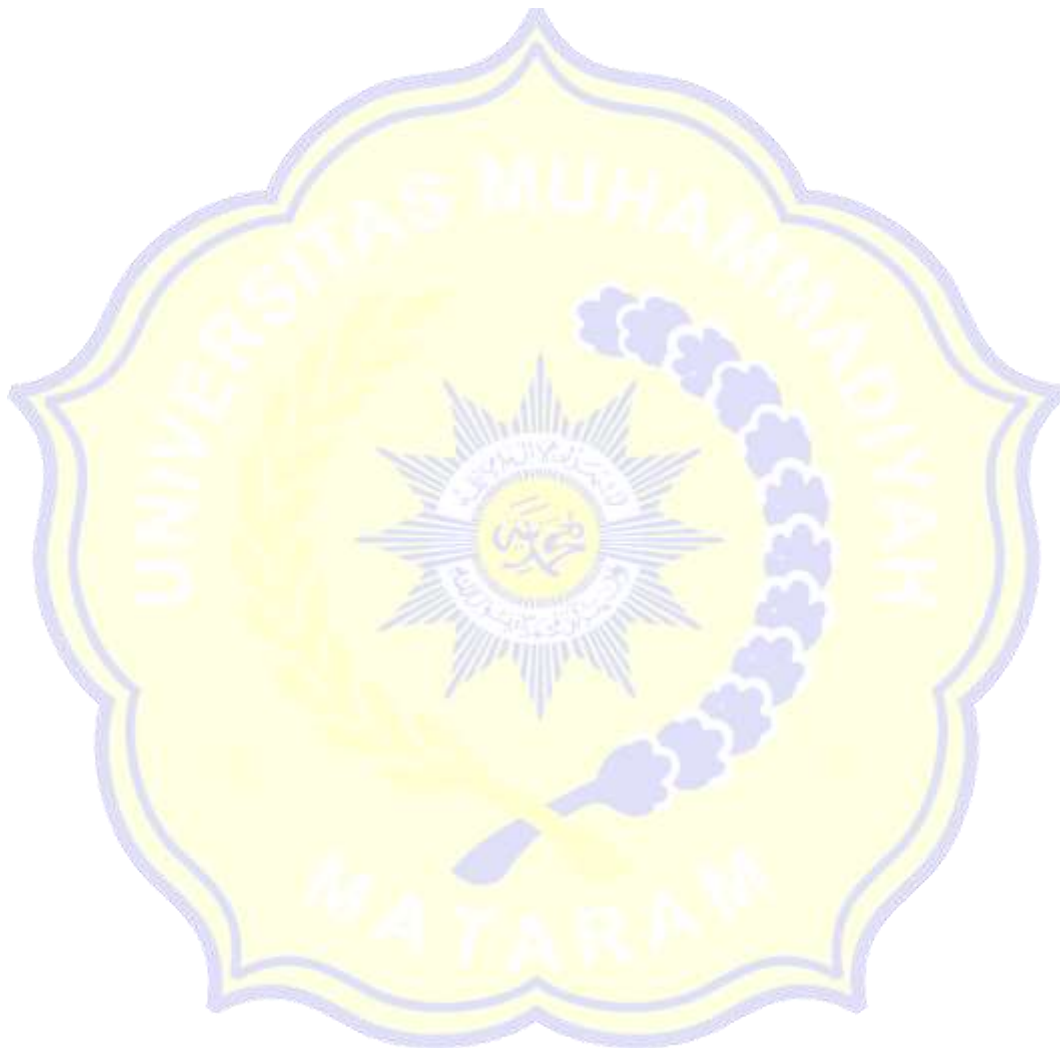
Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa.. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Dalam rangka implementasi kebijakan sosial tersebut, pemerintah telah menetapkan mekanisme pelaksanaan, termasuk di dalamnya syarat-syarat bagi penerima. Dalam berbagai media sering diberitakan tentang polemik diantara berbagai pihak atas kebijakan pemberian BLT. Selain itu, tidak jarang diberitakan tentang protes masyarakat yang merasa di perlakukan tidak adil atas implementasi kebijakan itu.

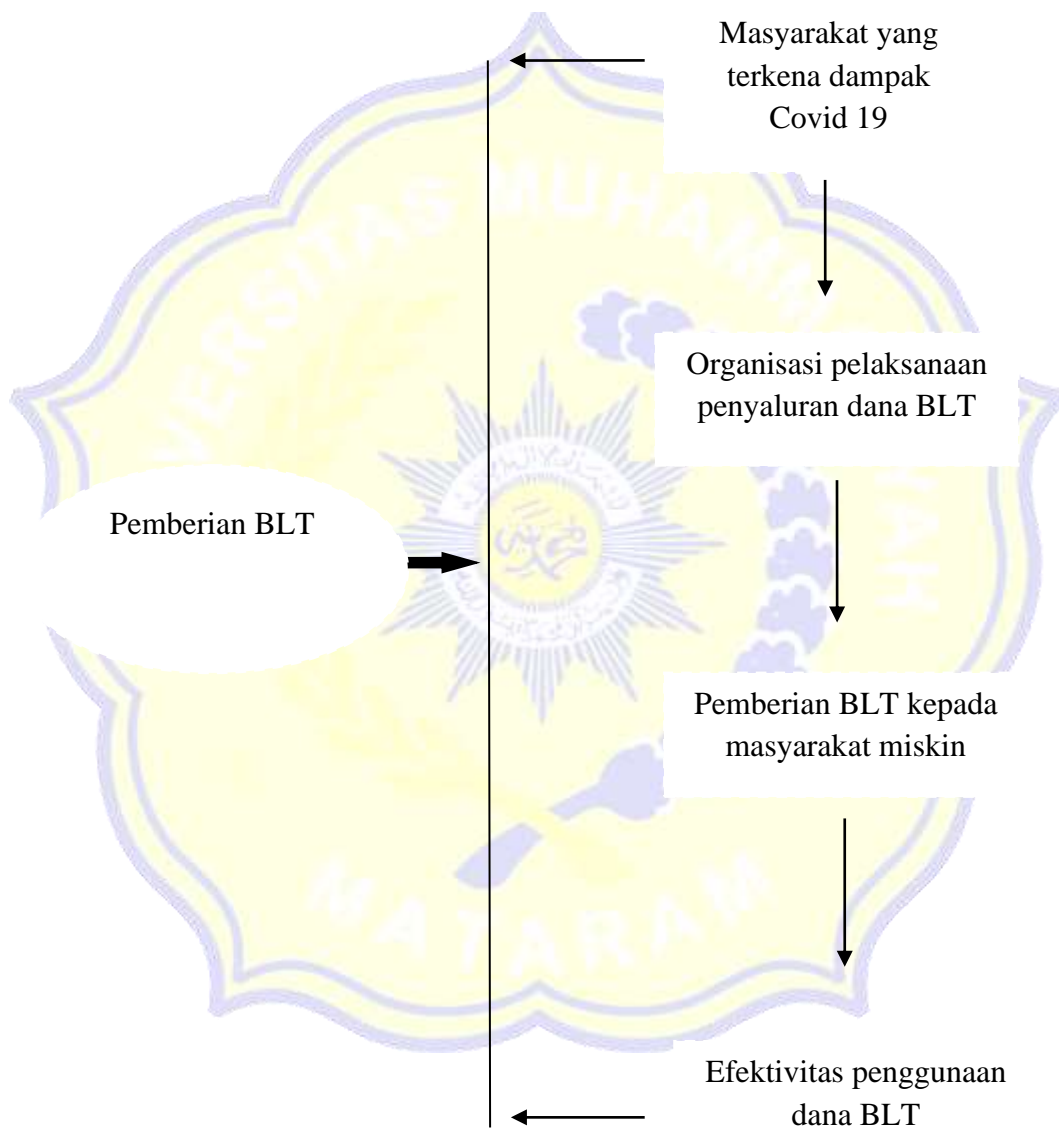
Sementara polemik atas kebijakan tersebut diantaranya berkenaan dengan efektivitas program pemberian BLT. Dalam meningkatkan sosial ekonomi dan pemecahan masalah kemiskinan.

Ada pihak yang berpendapat bahwa kebijakan pemberian BLT tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sosial ekonomi dan ada pula pendapat yang sebaliknya. Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini di sketsakan dalam bentuk bagan alir fikir berikut ini :



Bagan 1

Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada subjek dan berkomunikasi dengan para informan (Marzuki, 2005: 133). Ahli lain mengungkapkan bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan kejadian menggunakan kalimat (Mardalis, 2004: 14). Selanjutnya menurut Arikunto (2008: 32), bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, kemudian disimpulkan menggunakan kalimat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif tentang efektivitas program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat yang terdampak covid 19.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat . Pemelihan lokasi penelitian, di

Desa Sermong Kecamatan Taliwang sebagai lokasi penelitian, karena lokasi tersebut memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

3.3 Penentuan Informan/NaraSumber

Informan/narasumber adalah orang akan dijadikan sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2010: 299). Dalam peneletian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam pnelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sebagai sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas (Sugiyono, 2010: 299).

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat umum, masyarakat penerima BLT, kepala desa staf Desa beserta masyarakat desa Sermong.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dalam hal ini adalah proses diperolehnya data dari sumber data, sumber data yang dimaksud berasal dari subyek penelitian (Mardalis, 2004: 87). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut:

3.4.1 Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan kepada tingkah laku pada suatu situasi tertentu (Mardalis, 2004: 20). Pendapat lain mengemukakan bahwa observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berupa tingkah laku tertentu (Sugiyono, 2010: 19). Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati tentang efektivitas program bantuan langsung tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4.2 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Arikunto, 2008: 126). Pendapat lain mengatakan bahwa metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden/penjawab (Mardalis, 2004: 109).

Mardalis (2004: 109), jenis wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data efektivitas program bantuan langsung tunai pada masyarakat terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lager agenda dan sebagainya (Arikunto, 2008: 17). Ahli lain mengungkapkan bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan segala macam dokumentasi, serta menjadikan pencatatan sistematis (Mardalis, 2004: 187). Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data tentang profil Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar atau data yang tidak dapat di ukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk tanggapan atau pertanyaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian sepenuhnya merupakan data kualitatif bentuk kalimat (Sugiyono, 2010: 14).

Berdasarkan pendapat diatas, maka data kualitatif merupakan jenis data yang berbentuk kata-kata, kalimat atau pendapat dari responden. Dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena data dari informasi yang terkumpul dalam bentuk kata-kata keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari subyek selama melakukan penelitian. Menurut Surakhmad (2009: 134), sumber data menurut sifatnya digolongkan menjadi 2 jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama

2. Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Arikunto, 2008: 67)

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang efektivitas program bantuan langsung tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis model interaktif. Analisis interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Arikunto, 2008: 89)

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan (Arikunto,2008: 91).

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data tentang efektivitas program bantuan lansung tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Arikunto, 2008: 93). Data yang disajikan dalam penelitian ini mengenai efektivitas program bantuan langsung tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai suatu bagian konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Arikunto, 2008: 95). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul dan diseleksi. Pengolahan data dilakukan dengan menarik simpulan secara induktif.